

## Analisis Perencanaan Pajak Untuk Penghematan Pajak Penghasilan Studi Kasus Pada CV Arkade Enam Pilar

Iqbal Maulana<sup>1</sup>, Muhammad Arief<sup>2</sup>, M. Karya Satya Azhar<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Prodi Akuntansi, Universitas Harapan Medan, Indonesia

e-mail: [iqbalmaulana5369@gmail.com](mailto:iqbalmaulana5369@gmail.com)

### Abstrak

*Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pajak sebagai upaya untuk mengurangi Pajak Penghasilan (PPH) di CV Arkade Enam Pilar. Latar belakang penelitian ini adalah peningkatan beban pajak yang dihadapi perusahaan setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan strategi perencanaan pajak yang tepat agar kewajiban pajak dapat diminimalkan tanpa melanggar regulasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik, manajer, kepala administrasi, staf keuangan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, perhitungan, dan pelaporan PPh untuk tahun 2022–2023. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan skema PPh Final UMKM sebesar 0,5% yang memudahkan administrasi dan mengurangi beban pajak. Secara keseluruhan, penerapan perencanaan pajak di CV Arkade Enam Pilar terbukti efektif dalam menekan beban pajak serta mendukung kelancaran operasional perusahaan, meskipun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi administrasi dan manajemen arus kas.*

**Kata kunci:** Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Penghematan Pajak, Beban Pajak.

### PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi finansial yang dilakukan oleh individu atau entitas kepada kas negara tanpa imbalan langsung atau keuntungan yang diterima. Prinsip pajak mencakup kepatuhan terhadap peraturan hukum dan penerapan penegakan hukum, serta tidak adanya imbalan langsung kepada individu atas pajak yang dibayarkan. Pajak dibayarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pajak melakukan dua peran utama: anggaran, yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah, dan regulasi, yang mengatur berbagai aspek ekonomi (Waluyo, 2019). Sistem penilaian resmi, sistem penilaian mandiri, dan sistem pemotongan pajak adalah tiga jenis sistem pemungutan pajak. Besar kewajiban pajak tahunan ditetapkan oleh otoritas perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku melalui metode sistem penilaian resmi. Dalam sistem ini, penghitungan dan pemungutan pajak dilakukan sendiri oleh petugas perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada bagaimana petugas perpajakan melakukan pekerjaan mereka (Waluyo, 2019).

Meminimalkan beban pajak dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk perubahan pada peraturan pajak dan tindakan yang melanggar peraturan pajak. Perencanaan pajak adalah upaya untuk mengurangi pajak. Pada dasarnya, perencanaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menyusun transaksi mereka dengan cara yang paling efektif untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang akan datang, sambil tetap mengikuti aturan hukum perpajakan yang berlaku. Langkah ini merupakan tahap awal dalam manajemen pajak, di mana strategi penghematan pajak terbaik ditentukan melalui pengumpulan data dan analisis peraturan pajak. Secara umum, tujuan utama perencanaan pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur transaksi supaya jumlah pajak yang harus dibayar serendah mungkin sambil tetap mengikuti peraturan yang ada (Yuyun et al., 2023).

Perusahaan CV Arkade Enam Pilar berlokasi di Jl. Karya Gg. Bersama No. 26, Kota Medan,

dan menyediakan layanan konsultasi bangunan gedung. Perusahaan ini selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan sistem evaluasi diri yang sah di Indonesia. Dalam operasinya, manajemen berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi pengeluaran. Selain itu, perusahaan berusaha menekan beban pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan tetap sesuai dengan hukum dan tidak melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pada CV Arkade Enam Pilar, yang mengalami kenaikan pembayaran pajak setiap tahunnya. Hal ini dapat dikurangi dengan perencanaan pajak yang efektif. CV Arkade Enam Pilar memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem self-assessment, di mana perusahaan menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Hasil wawancara singkat dengan petugas yang menangani perhitungan PPh di perusahaan ini menunjukkan adanya kendala pada Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bulanan ketika sudah menerbitkan faktur pajak namun vendor belum membayar untuk pekerjaan tersebut, serta perhitungan dalam jasa konsultasi dan konstruksi.

Perencanaan pajak yang strategis dapat memberikan berbagai keuntungan. Keuntungan tersebut mencakup efisiensi biaya melalui pengurangan pajak, pengelolaan arus kas yang lebih baik, perkiraan kebutuhan pembayaran pajak, serta membantu dalam penyusunan anggaran kas perusahaan dengan lebih tepat. Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki peran penting dalam mengurangi kewajiban pajak serta menjaga likuiditas suatu perusahaan. Isnawati (2020) mengungkapkan bahwa dengan memperbaiki laporan keuangan dan mengatur biaya operasional secara tepat sesuai dengan ketentuan fiskal, beban pajak dapat diminimalisir secara signifikan pada Kantor Notaris/PPAT. Fitriyani et al (2022) melakukan analisis mengenai penerapan PPh Final UMKM sebesar 0,5% di PT Mega Jaya Net dan menemukan bahwa perusahaan ini berhasil mengurangi pajak sebesar Rp133. 535. 778 serta meningkatnya laba bersih.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu dengan mengamati berbagai fakta dan fenomena yang ada di lapangan, lalu menganalisis serta menarik teori berdasarkan hasil pengamatan tersebut (Bungin, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan pajak dalam upaya penghematan Pajak Penghasilan (PPh). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi pada CV Arkade Enam Pilar Medan.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah data yang telah dikumpulkan guna menghasilkan kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Menghimpun dan merapikan informasi yang diperoleh untuk menyusun gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian, termasuk profil perusahaan, struktur organisasi, serta aktivitas yang dijalankan.
2. Mengumpulkan data berupa dokumentasi terkait perencanaan PPh dan laporan lain yang relevan dengan penelitian.
3. Menyusun landasan teori yang berkaitan dengan isu yang diteliti.
4. Menganalisis penerapan perencanaan perpajakan perusahaan, yang mencakup aspek perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh).
5. Merumuskan kesimpulan dan memberikan rekomendasi terkait strategi perencanaan pajak guna mengoptimalkan efisiensi pembayaran PPh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Wawancara

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan perpajakan perusahaan untuk

memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data mencakup metode primer dan metode sekunder, sehingga dapat menghasilkan informasi yang komprehensif untuk mendukung analisis penelitian (Sugiyono, 2019). Proses wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman tujuan penelitian, identifikasi topik, penyusunan pertanyaan terbuka yang mengalir dari umum ke spesifik, dan pertanyaan penggalian (probing) untuk memperdalam jawaban. Pelaksanaannya juga melibatkan persiapan awal, membangun hubungan baik dengan informan, bersikap fleksibel, dan melakukan uji coba untuk memastikan pertanyaan mudah dipahami.

Tabel 1. Pertanyaan 1

Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terkait kewajiban PPh pada bidang jasa perencanaan konstruksi?	
Narasumber	Jawaban
Direktur	PPh adalah kewajiban perusahaan atas penghasilan jasa.
Manager	PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima perusahaan
Kepala Administrasi	Perlu dicatat dan dilaporkan setiap periode
Kuangan	PPh terkait langsung dengan laba usaha
Pemberkasan	Semua dokumen wajib disiapkan untuk pelaporan

(Sumber: CV Arkade Enam Pilar, 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan telah memahami kewajiban PPh dari perspektif masing-masing fungsi, baik dari segi pemotongan, pencatatan, pelaporan, hingga penyediaan dokumen. Hal ini menandakan bahwa kesadaran perpajakan telah terinternalisasi dengan baik, meskipun setiap bagian memiliki fokus tanggung jawab yang berbeda.

Tabel 2. Pertanyaan 2

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang penerapan tarif PPh Badan 22% pada perusahaan?	
Narasumber	Jawaban
Direktur	Tarif cukup tinggi
Manager	Memberatkan bila pendapatan kecil
Kepala Administrasi	Perlu penyesuaian sistem laporan
Kuangan	Beban pajak meningkat
Pemberkasan	Dokumen lebih kompleks

(Sumber: CV Arkade Enam Pilar, 2025)

Sebagian besar narasumber menilai bahwa penerapan tarif PPh Badan sebesar 22% cukup membebani, terutama bagi perusahaan dengan kapasitas keuangan yang masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan daya dukung finansial perusahaan kecil dalam menyesuaikan diri terhadap tarif normal, sehingga alternatif skema PPh Final UMKM menjadi lebih relevan untuk dipilih.

Tabel 3. Pertanyaan 3

Apa alasan CV Arkade Enam Pilar memilih menggunakan PPh Final UMKM 0,5%?	
Narasumber	Jawaban
Direktur	Lebih ringan
Manager	Beban pajak lebih kecil
Kepala Administrasi	Perhitungan sederhana
Kuangan	Meringankan arus kas
Pemberkasan	Administrasi lebih mudah

(Sumber: CV Arkade Enam Pilar, 2025)

Pemilihan skema PPh Final UMKM sebesar 0,5% didasarkan pada pertimbangan efisiensi, baik dari segi perhitungan, arus kas, maupun administrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan mengutamakan simplifikasi kewajiban perpajakan dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Tabel 4. Pertanyaan 4

Bagaimana dampak penggunaan PPh Final 0,5% terhadap keuangan perusahaan?	
Narasumber	Jawaban
Direktur	Keuangan lebih stabil
Manager	Beban pajak tidak terlalu besar
Kepala Administrasi	Laporan sederhana
Keuangan	Cash flow lebih terjaga
Pemberkasan	Dokumen lebih ringkas

(Sumber: CV Arkade Enam Pilar, 2025)

Dampak penggunaan tarif final 0,5% dirasakan positif oleh perusahaan karena dapat menjaga kestabilan keuangan, memperkuat arus kas, serta menyederhanakan administrasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut cukup efektif mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah.

Tabel 5. Pertanyaan 5

Apakah ada kesulitan dalam menghitung PPh 0,5%?	
Narasumber	Jawaban
Direktur	Tidak sulit
Manager	Cukup mudah
Kepala Administrasi	Tinggal mengalikan omzet
Keuangan	Tidak rumit
Pemberkasan	Prosesnya cepat

(Sumber: CV Arkade Enam Pilar, 2025)

Proses perhitungan PPh Final UMKM dinilai sederhana dan mudah diterapkan karena hanya didasarkan pada omzet. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan tidak menghadapi hambatan teknis berarti dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai skema tersebut.

Tabel 6. Pertanyaan 6

Apakah perusahaan sudah siap jika sewaktu-waktu harus kembali ke tarif PPh Badan 22%?	
Narasumber	Jawaban
Direktur	Perlu persiapan
Manager	Akan memberatkan
Kepala Administrasi	Laporan harus disesuaikan
Keuangan	Perlu revisi perhitungan
Pemberkasan	Dokumen lebih kompleks

(Sumber: CV Arkade Enam Pilar, 2025)

Kesiapan perusahaan untuk kembali ke tarif normal PPh Badan 22% masih terbatas, terutama karena dikhawatirkan akan menambah beban keuangan dan kompleksitas administrasi. Kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan akan perencanaan jangka panjang jika transisi tarif tersebut benar-benar diberlakukan.

Tabel 7. Pertanyaan 7

Apakah perusahaan pernah menggunakan jasa konsultan pajak untuk PPh?	
Narasumber	Jawaban

Direktur	Belum pernah
Manager	Semua diurus internal
Kepala Administrasi	Ditangani bagian administrasi
Kuangan	Dikerjakan sendiri
Pemberkasan	Tidak ada konsultan

(Sumber: CV Arkade Enam Pilar, 2025)

Perusahaan mengelola kewajiban perpajakan secara mandiri tanpa menggunakan jasa konsultan. Pilihan ini menunjukkan tingkat kemandirian administrasi yang relatif baik, sekaligus efisiensi biaya, meskipun tetap berpotensi menimbulkan risiko jika terjadi kekeliruan teknis.

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa CV Arkade Enam Pilar memahami kewajiban perpajakan dari PPh dan PPN. Penggunaan PPh Final 0,5% dipilih karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan, dan PPN tetap dijalankan sesuai ketentuan meskipun ada kendala teknis dan keterlambatan pembayaran klien. Perencanaan pajak masa depan akan berkonsentrasi pada peningkatan pencatatan, efektivitas keuangan, dan kesiapan untuk perubahan kebijakan perpajakan.

### Analisis

#### Perhitungan PPh Dengan Tarif Badan 22%

Secara umum, sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh jo. UU HPP 2021, Wajib Pajak Badan dikenakan tarif sebesar 22% atas laba kena pajak. Jika CV Arkade Enam Pilar menggunakan tarif umum ini, maka perhitungan pajaknya sebagai berikut:

Tabel 8. Perhitungan PPh dengan Tarif Badan 22%

Tahun	Omzet (Rp)	Laba Bersih	Tarif PPh Badan	PPh Terutang (Rp)
2022	1.440	708.2	22%	161
2023	702.9	392.4	22%	87.1
<b>Total</b>	<b>2.143</b>	<b>1.127</b>	-	<b>248.1</b>

(Sumber: data diolah, 2025)

#### Perhitungan PPh Final UMKM 0,5%

Namun karena omzet perusahaan masih  $\leq$  Rp 4,8 miliar, maka sesuai PP No. 23 Tahun 2018 jo. PP No. 55 Tahun 2022, CV Arkade Enam Pilar dapat menggunakan skema PPh Final 0,5% dari omzet.

Tabel 9. Perhitungan PPh Final UMKM 0,5%

Tahun	Omzet (Rp)	Tarif Final	PPh Final Terutang (Rp)
2022	1.440	0,5%	7.2
2023	702.9	0,5%	3.5
<b>Total</b>	<b>2.143</b>	-	<b>10.7</b>

(Sumber: data diolah, 2025)

### Perbandingan dan Efektivitas Perencanaan Pajak

Tabel 10. Perbandingan dan Efektivitas Perencanaan Pajak

Tahun	PPh Badan 22% (Rp)	PPh Final 0,5% (Rp)	Penghematan (Rp)
2022	161	7.2	153.8
2023	87.1	3.5	83.5
<b>Total</b>	<b>248.1</b>	<b>10.7</b>	<b>237.4</b>

(Sumber: data diolah, 2025)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penggunaan skema PPh Final 0,5% memberikan penghematan pajak yang signifikan, yaitu sebesar Rp 237.430.966 atau sekitar 95,7% dalam dua tahun. Hal ini menegaskan bahwa strategi perencanaan pajak yang dilakukan CV Arkade Enam Pilar bersifat defensif karena memanfaatkan fasilitas yang sah untuk menekan beban pajak. CV Arkade Enam Pilar memilih menggunakan PPh Final 0,5% karena lebih sederhana, ringan, dan sesuai dengan skala usaha. Strategi yang dilakukan adalah mencatat omzet secara teratur, mengalokasikan dana khusus untuk setoran pajak, serta menjaga kelengkapan administrasi agar pelaporan tetap akurat. Selain itu, perusahaan juga mulai menyiapkan sistem pembukuan lebih rapi sebagai antisipasi jika ke depan harus beralih ke tarif PPh normal 22%.

## KESIMPULAN

### Pembahasan PPh dalam Perspektif Teori dan Regulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Arkade Enam Pilar memutuskan untuk menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari penjualan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022. Pilihan ini sejalan dengan konsep perencanaan pajak defensif, yang merupakan upaya untuk menekan beban pajak tanpa melanggar hukum dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh undang-undang (Resmi, 2021). Perusahaan dapat menghemat beban pajak hingga lebih dari 90% dengan tarif final daripada tarif umum 22%.

### Strategi Perencanaan Pajak (Defensif & Preventif)

Perencanaan pajak yang dilakukan CV Arkade Enam Pilar dapat dikategorikan adalah: Defensif → penggunaan fasilitas PPh Final 0,5% untuk mengurangi beban pajak. Pada CV Arkade Enam Pilar, strategi perencanaan penghematan pajak penghasilan (PPh) bersifat defensif karena berfokus pada menjaga posisi fiskal dan mengurangi risiko pajak sambil mempertimbangkan kepatuhan hukum. Perusahaan memilih skema PPh Final UMKM 0,5% untuk menjaga stabilitas arus kas dan membuat administrasi lebih mudah. Mereka juga ingin menghindari kenaikan tarif normal 22%. Penguatan dokumentasi dan laporan teratur, serta persiapan untuk perubahan regulasi melalui koordinasi internal dan efisiensi pengelolaan, mendukung langkah ini. Oleh karena itu, bisnis menggunakan prinsip penghematan pajak melalui pertahanan, yaitu penghematan pajak yang diperoleh melalui kehati-hatian, kepatuhan formal, dan perlindungan terhadap risiko fiskal jangka panjang.

### Implikasi Hasil Penelitian terhadap CV Arkade Enam Pilar

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa perusahaan berhasil menekan beban PPh secara signifikan, tetapi masih menghadapi beban PPN yang cukup besar. Hal ini menjadi masukan penting bagi perusahaan untuk menyusun strategi jangka panjang, terutama dalam mengantisipasi berakhirnya masa fasilitas PPh Final dan meningkatkan efektivitas pengelolaan PPN. Selain itu, data laporan keuangan juga menjadi dasar untuk menghitung besarnya **PPN keluaran dan masukan**, meskipun dalam periode penelitian CV Arkade Enam Pilar tidak melakukan transaksi PPN Masukan. Hal ini memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara bahwa pelaksanaan PPN lebih sering terkendala pada faktor eksternal, seperti keterlambatan pembayaran klien. Data ini memperlihatkan bahwa omzet perusahaan masih di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, sehingga sesuai ketentuan **PP No. 23 Tahun 2018 UU HPP Tahun 2021**, perusahaan dapat menggunakan skema **PPh Final UMKM 0,5%**.

### Keterbatasan

Dokumen internal yang digunakan terbatas pada **laporan keuangan tahun 2022 dan 2023**. Perusahaan tidak memberikan izin untuk mempublikasikan dokumen internal lain di luar laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut menunjukkan posisi keuangan perusahaan, termasuk pendapatan dan beban, yang menjadi dasar dalam menghitung kewajiban perpajakan.

#### REFERENSI

- Arfandi, & Nurhani. (2023). Perencanaan Pajak: Upaya Menghemat Pajak Penghasilan Badan”. *Jurnal Mirai Management*, 8(7), 337–346.
- Bungin, B. (2019). *Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group.
- Fitriyani, M., Abbas, A., & Rohmah, S. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mega Jaya Net. *Jurnal Obor Oikonomia Borneo*, 4(1).
- Isnawati. (2020). Analisis Perencanaan Pajak untuk Menghemat Pengeluaran Pajak pada Kantor Notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(2).
- Pudyatmoko, Y. (2020). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Pajak* (1st ed.). Salemba Empat.
- Sejati, R., Sonjaya, Y., Pertiwi, D., & Wahyuni. (2023). Apa Saja Faktor Penentu Penggelapan Pajak? Studi pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Jayapura. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 5.
- Setyaningsih, E., & Indrawan, R. (2023). Analysis Of Tax Planning Implementation To Minimize Value Added Tax Load. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 7(1), 1–8.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.
- Yuyun, Agustin, B., & Srikalimah. (2023). Evaluasi Tax Planning Guna Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Agrimara Cipta Nutrindo). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 74–85.